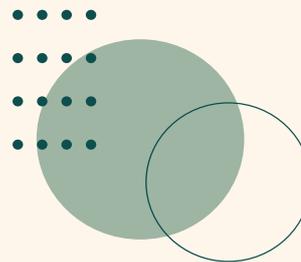
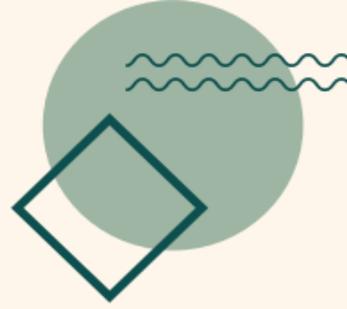


# LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2024



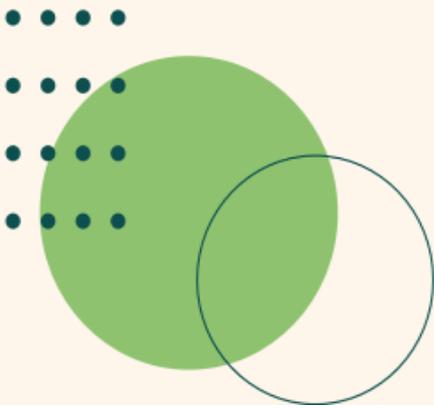


## LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



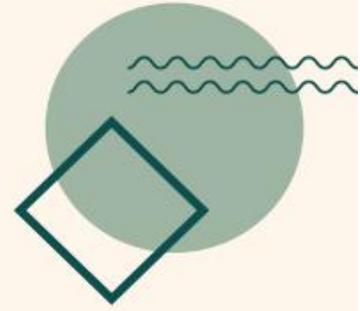


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III  
Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2024

NO	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Hartanto, S.IP	Pengawas Transportasi Darat	20/2025 /1	A
2.	Dikonsep	Rizky Satrio Wibowo, A.Md.Tra.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	20/2025 /1	
3.	Dikonsep	Tomi Feri Irawan, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	20/2025 /1	
4.	Diperiksa	Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si	Kepala BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat	20/2025 /1	

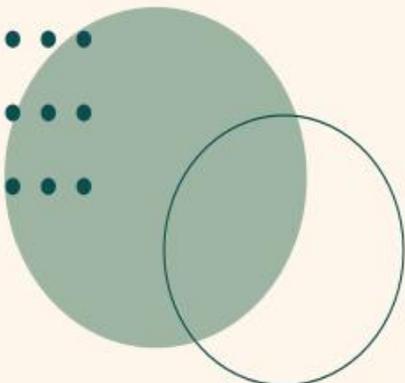


## KATA PENGANTAR

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat mengemban amanah sebagai organisasi pemerintah yang menjunjung tinggi profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung seluruh kegiatan masyarakat, melalui transportasi yang cepat, aman dan nyaman. Laporan ini bukan hanya sekadar kumpulan angka dan fakta, tetapi merupakan cerminan dari dedikasi dan kerja keras dari kami untuk mencapai tujuan dan memenuhi amanah yang diberikan kepada kami. Dalam konteks ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam perjalanan ini.

Melalui laporan ini, kami berupaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami tidak hanya menyoroti pencapaian yang telah diraih, tetapi juga menguraikan rencana-rencana yang kami tetapkan, serta mengukur sejauh mana capaian tersebut sesuai dengan harapan. Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat, kami menjunjung tinggi standar akuntabilitas yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini holistik, mencakup detail Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024, evaluasi Pengukuran Kinerja pada tahun tersebut, serta analisis mendalam terkait tingkat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian kinerja pada tahun tersebut.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak hanya sekedar menjadi dokumen Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai kegiatan, tetapi lebih dari itu, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kemajuan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun yang akan datang.

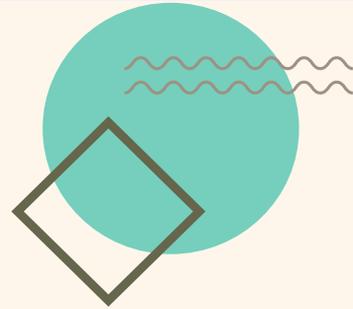
Mamuju, 20 Januari 2024

Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si

NIP.19700730-1993011002

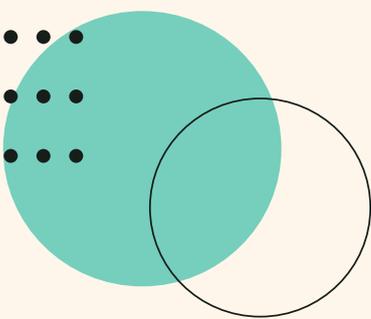


## RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel;

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.



Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat tahun 2023, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ )

Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional yang beroperasi terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (target 1 lokasi) tercapai 100%;
4. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A sebesar 64,5% (target 60%) tercapai 107,5%;
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 60,5% (target 60%) tercapai 100%;
6. Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 20% (target 18,78%) tercapai 106%;
8. Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 600 orang (target 600 orang) tercapai 100%;
9. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 79 (target 80) tercapai 98,75%;
10. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 78 (target 80) tercapai 97,5%;

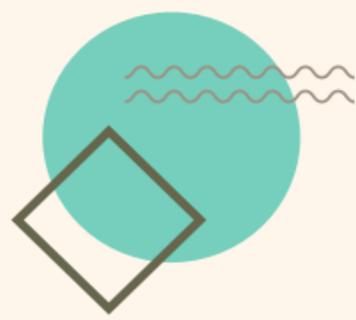
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain



melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/ praktik terbaik dan terkini.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

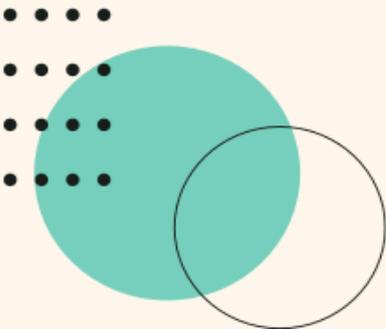


## DAFTAR ISI

### LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



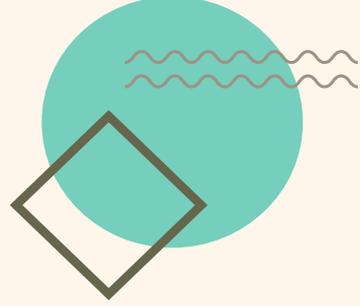


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
I.2.1. Bagan Struktur Organisasi .....	2
I.3. Sumber Daya Manusia.....	7
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....	8
I.2. Siatematika Laporan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	20
II.2. Uraian Singkat Perencanaan Strategis .....	20
II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	22
II.2.1. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	24
II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024 .....	26
II.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024 .....	28
II.2.3. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	35
III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja .....	35
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja.....	35
III.2.1. Metode Pengukuran.....	35
III.2.3. Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	36
III.2.4. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
III.2.5. SK1 : Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi.....	40
III.2.5.1. IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan .....	40
III.2.5.2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi .....	48
III.2.5.3. IKK 1. 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi .....	58
III.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat.....	65



III.2.6.2. IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A.....	65
III.2.6.2. IKK 2.2 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP .....	72
III.2.7. SK4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat .....	78
III.2.7.1. IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	78
III.2.7.2. IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	84
III.2.7.2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan .....	91
III.2.8. SK5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	97
III.2.8.1. IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	97
III.2.8. SK6. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat .....	105
III.2.8.1. IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat .....	105
III.3. Realisasi Anggaran.....	112
III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024 .....	112
III.3.1.1. Pagu Anggaran .....	112
III.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2024.....	115
III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	121
III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024.....	121
III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	122
III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024 .....	122
III.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja.....	123
III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	125
III.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.....	125
III.3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia.....	127
IV.3. Hambatan dan Kendala.....	127
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
IV.1. Penutup.....	129
IV.1.1. Ringkasan Capaian .....	129
IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	131
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>136</b>

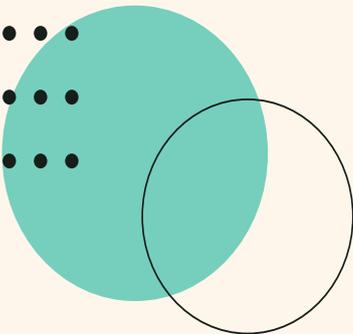


## DAFTAR TABEL

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024





DAFTAR TABEL

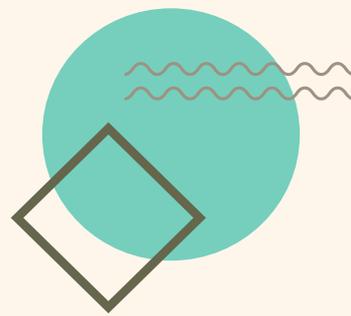
Table 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi .....	37
Table 3. 2 Trayek Ritase Angkutan Keperintisan Jalan .....	43
Table 3. 3 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	47
Table 3. 4 Benchmark Nasional .....	47
Table 3. 5 Terminal Tipe-A yang Beroperasi .....	54
Table 3. 6 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	57
Table 3. 7 Benchmark Nasional .....	58
Table 3. 8 Pelabuhan Eksisting .....	61
Table 3. 9 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	64
Table 3. 10 Benchmark Nasional .....	64
Table 3. 11 SPM TTA dan Pelabuhan SDP .....	65
Table 3. 12 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	70
Table 3. 13 Benchmark Nasional .....	71
Table 3. 14 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	77
Table 3. 15 Benchmark Nasional .....	78
Table 3. 16 Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 .....	80
Table 3. 17 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	83
Table 3. 18 Benchmark Nasional .....	84
Table 3. 19 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	90
Table 3. 20 Benchmark Nasional .....	91
Table 3. 21 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	96
Table 3. 22 Benchmark Nasional .....	97
Table 3. 23 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	98
Table 3. 24 Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	100
Table 3. 25 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	104
Table 3. 26 Benchmark Nasional .....	105
Table 3. 27 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....	105
Table 3. 28 Rumus Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi .....	107
Table 3. 29 Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 .....	109
Table 3. 30 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 .....	110
Table 3. 31 Benchmark Nasional .....	111
Table 3. 32 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024 .....	112
Table 3. 33 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024 .....	112



Table 3. 34 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 .....	115
Table 3. 35 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	116
Table 3. 36 Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	118
Table 3. 37 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024 .....	121
Table 3. 38 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	122
Table 3. 39 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024 .....	123
Table 3. 40 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 .....	123
Table 3. 41 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024.....	123
Table 3. 42 Sisa Anggaran Kontraktual dan NonKontraktual .....	124
Table 3. 43 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.....	125
Table 3. 44 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia.....	127



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

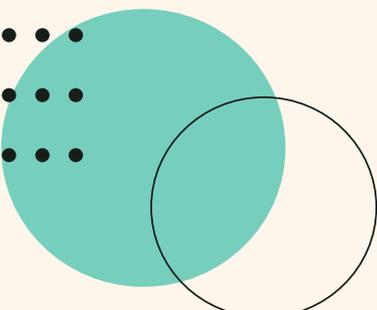


## DAFTAR GAMBAR

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



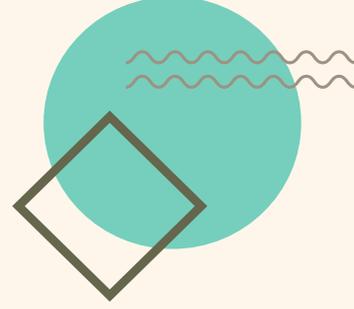


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi .....	2
Gambar 3. 1 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Angkutan Jalan .....	41
Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	45
Gambar 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	46
Gambar 3. 4 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi .....	52
Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	55
Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	57
Gambar 3. 7 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi .....	59
Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	62
Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	63
Gambar 3. 10 Target dan Realisasi Kinerja SPM TTA .....	66
Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	69
Gambar 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	70
Gambar 3. 13 Target dan Realisasi Kinerja SPM Pelabuhan SDP .....	73
Gambar 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	76
Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	77
Gambar 3. 16 Target Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan .....	79
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	82
Gambar 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	83
Gambar 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pelanggaran UPPKB.....	86
Gambar 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	89
Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. ....	90
Gambar 3. 22 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan .....	92
Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	95



Gambar 3. 24 Perbandingan Realisasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	96
Gambar 3. 25 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	99
Gambar 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	102
Gambar 3. 27 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	104
Gambar 3. 28 IKK Kualitas Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat .....	106
Gambar 3. 29 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	109
Gambar 3. 30 Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat .....	110
Gambar 3. 31 Realisasi Capaian Anggaran .....	122

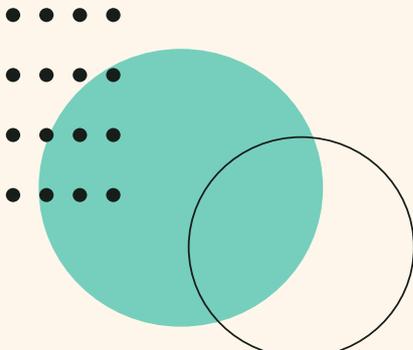


## DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



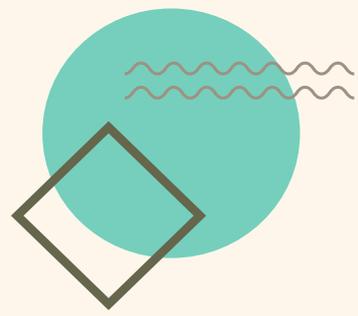
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	137
Lampiran 1. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	138
Lampiran 1. 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2024.....	139
Lampiran 1. 4 Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024.....	140
Lampiran 1. 5 Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2025.....	141
Lampiran 1. 6 Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2025.....	142
Lampiran 1. 7 Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024.....	143
Lampiran 1. 8 Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024.....	144
Lampiran 1. 9 Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024.....	145
Lampiran 1. 10 Monitoring Rencan Aksi Tahun 2024.....	146

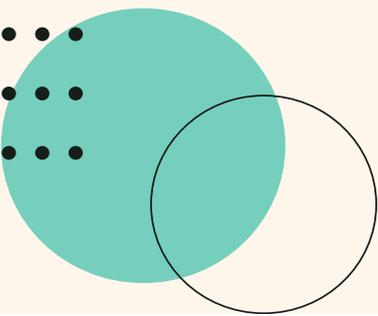


## BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024





## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

### I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 06 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD, dimana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan,

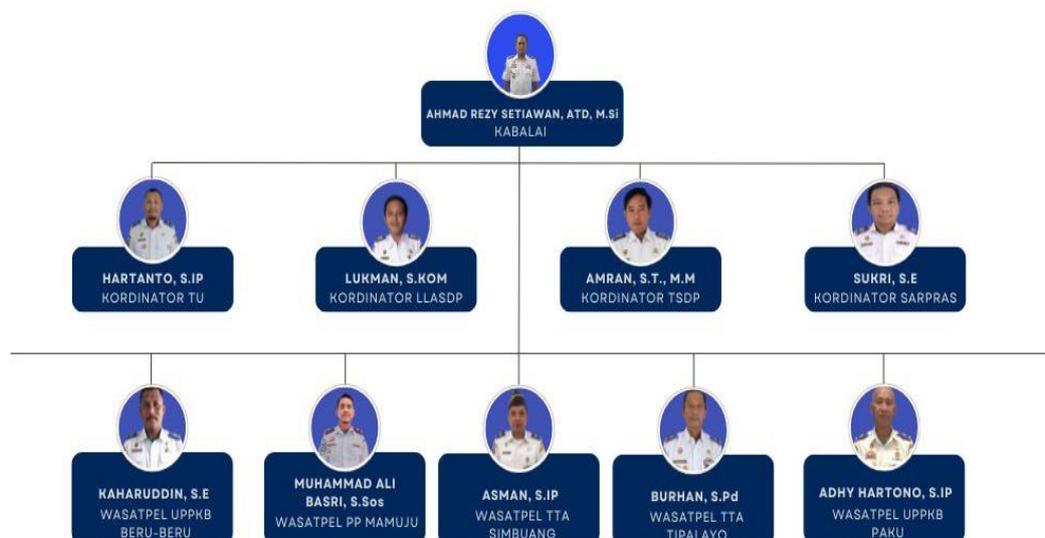
pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Urusan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan;
- c. Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan;
- d. Urusan Sarana dan Prasarana Penyeberangan SDP;
- e. Satuan Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### I.2.1. Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi



## 1. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun konsep surat atau nota dinas urusan kepegawaian (usulan Kenaikan Pangkat, Diklat, Kenaikan Gaji Berkala, Ujian Dinas / Penyesuaian Ijazah, KARPEG, ASKES, KARIS / KARSU, Cuti, DP3, pensiun, dll);
- b. Menyiapkan berkas / data untuk pengusulan pengangkatan pegawai, Kenaikan Pangkat (KP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan pensiun pegawai di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat;
- c. Mengumpulkan SKP dan laporan bulanan masing-masing PNS, laporan bulanan pelaksanaan tugas pegawai honorer/PPPK;

Urusan Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Analis Kepegawaian Penyelia;
- 2) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan;
- 3) Analis Kepegawaian Pelaksana;
- 4) Penyusun Rencana dan Pelaporan;
- 5) Penelaah Kehumasan dan Publikasi;
- 6) Pengelola Ketatausahaan;
- 7) Pengelola Kepegawaian;
- 8) Pengelola Urusan Kerumahtanggaan;
- 9) Pengelola Keuangan;
- 10) Pengelola Data dan Sistem Informasi; dan
- 11) Pengadministrasi Umum.

## 2. Urusan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

Urusan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.



Dalam melaksanakan tugas, Urusan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan, Terminal Penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Pengawasan Terminal Barang;
- b. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan.

Urusan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

- 1) Pengawas Pengujian, Pemeriksaan, dan Perawatan;
  - 2) Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan;
  - 3) Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ; dan
  - 5) Pengadministrasian Umum.
3. Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan

Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan Angkutan Orang Lintas Batas Negara dan/ atau Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, dan Angkutan Barang;
- b. Penyusunan Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional; dan
- c. Penyidikan dan Pengusulan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, terdiri dari:

- 1) Penelaah Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan;
  - 2) Pemroses Data Angkutan;
  - 3) Analisis Keselamatan LLAJSDP;
  - 4) PPNS; dan
  - 5) Pengolah Data Pengawasan.
4. Urusan Sarana dan Prasarana Penyeberangan SDP



Urusan Sarana dan Prasarana Penyeberangan SDP mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalulintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Sarana dan Prasarana Penyeberangan SDP menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan;
- c. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Urusan Sarana dan Prasarana Penyeberangan SDP, terdiri dari:

- 1) Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan;
  - 2) Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP;
  - 3) PPNS;
  - 4) Pemroses Data Angkutan;
  - 5) Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Keselamatan LLAJSDP;
  - 6) Penganalisa Tarif Jasa Kepelabuhanan; dan 7. Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan.
5. Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal



Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan Teknis Operasional Terminal Tipe A (Rencana Kerja);
- b. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan dan Penelaahan Data / Informasi Sebagai Bahan Laporan;
- c. Melakukan Pengelolaan, Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan Terminal Tipe A;
- d. Melakukan Pengelolaan Ketatausahaan Terminal Tipe ;
- e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Terminal Tipe A; dan
- f. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Balai Secara Berkala;
- g. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait; dan
- h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Terminal Penumpang Tipe A yang ada di lingkungan kerja BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- 1) Terminal Penumpang Tipe-A Simbuang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
  - 2) Terminal Penumpang Tipe-A Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
7. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Rencana Kerja, Program, dan Prosedur Kerja UPPKB;
- b. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan dan Penelaahan Data / Informasi Sebagai Bahan Laporan;
- c. Melakukan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan UPPKB;
- d. Melakukan Pembinaan Pengelolaan Ketatausahaan UPPKB;
- e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UPPKB;
- f. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Balai Secara Berkala;
- g. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- h. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ada di lingkungan kerja BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- 1) UPPKB Paku Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;



- 2) UPPKB Beru-Beru Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan
  - 3) UPPKB Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (Tidak Beroperasi/ Rusak Berat).
8. Pelabuhan Penyeberangan (PP)
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan Rencana Kerja, Program, dan Prosedur Kerja Pelabuhan Angkutan Penyeberangan;
  - b. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan Dan Penelaahan Data / Informasi Sebagai Bahan Laporan;
  - c. Melakukan Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersial;
  - d. Pembinaan Pengelolaan Ketatausahaan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersial;
  - e. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersial;
  - f. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Balai Secara Berkala;
  - g. Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait; dan
  - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan oleh Pimpinan.

Pelabuhan Penyeberangan yang ada di lingkungan kerja BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- 1) PP Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

### I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menaungi sebanyak 167 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Table 1.1 Sumber Daya Manusia BPTD Kelas III Sulawesi Barat

NO	UNIT KERJA	TOTAL
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat	1
2	Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III	45



	Provinsi Sulawesi Barat	
3	Terminal Tipe A Simbuang Mamuju Sulawesi Barat	30
4	Terminal Tipe A Tupalayo Polewali Mandar Sulawesi Barat	19
5	UPPKB Paku Polewali Mandar Sulawesi Barat	34
6	UPPKB Beru-Beru Mamuju Sulawesi Barat	27
6	UPPKB Sarjo Pasangkayu Sulawesi Barat	3
7	PP Mamuju Sulawesi Barat	8
Total		167

#### I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

##### 1. Kewenangan

###### a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

###### b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/ pembebasan lahan untuk jalan akses.

###### c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:



- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
  - 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.
2. Sumber Daya Manusia
- Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPTD dan Satuan Pelayanan). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat Satuan Pelayanan yang belum memenuhi standar jumlah pegawai dalam menjalankan tupoksi.
3. Anggaran
- Pada tahun 2024 terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sudah dapat memenuhi kebutuhan terhadap administrasi, prasarana, dan sarana perhubungan darat.
4. Isu Strategis
- Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah:
- a. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - b. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
  - c. Pengoperasian Terminal Penumpang;
  - d. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
  - e. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
  - f. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
  - g. ODOL (Over Dimension Over Loading);
  - h. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
  - i. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
  - j. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
  - k. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.
5. Ruang Lingkup



Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah:

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja
- c. Indikator Kinerja Program
- d. Pengukuran Kinerja
- e. Evaluasi Kinerja

## I.2. Siatematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.2.1. Bagan Struktur Organisasi
1. 3. Sumber Daya Manusia
1. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
1. 5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
  - II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



## II. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024

### II.2.2. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### II. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja

### II. 2. Pengukuran Capaian Kinerja

#### II.2.1. **SP1** Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

##### II.2.1.1. **IKP 1** Rasio Konektivitas Transportasi

###### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

###### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II

###### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

###### a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan

###### a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

###### a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

###### a.7. Benchmark Nasional/Internasional



#### II.2.1.2. IKP 2 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

##### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

##### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

##### a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan

##### a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

##### a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

##### a.7. Benchmark Nasional/Internasional

#### II.2.2. SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan

##### II.2.2.1. IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

##### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023

##### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan



- Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
  - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024
- a.7. Benchmark Nasional/Internasional
- II.2.2.2. IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP
- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
  - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan



a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2022, 2021 dan 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional/Internasional

#### II.2.2.3. IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional/Internasional

#### II.2.3. SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

##### III.2.5.1. IK 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

a. 1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan



- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
  - a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
    - Narasi Dasar Hukum
    - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
    - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
    - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
    - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
    - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
    - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
  - a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan
  - a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
  - a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024
  - a.7. Benchmark Nasional/Internasional
- III.2.5.2. IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran
- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
  - a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
  - a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
    - Narasi Dasar Hukum
    - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
    - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
    - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
    - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
    - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
    - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
  - a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan
  - a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020
  - a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024
  - a.7. Benchmark Nasional/Internasional



II.2.4. SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

III.2.4.1.IKP 1 Rasio Total Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Diterbitkan/Ditetapkan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya peningkatan akses di masa depan

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional/Internasional

II. 3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

II.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

a. 1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024



a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

II.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

II.3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

II.3.4. Hambatan dan Kendala

## BAB IV PENUTUP

III. 1. Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

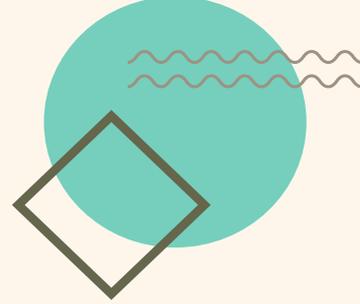
III. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

## LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan),
3. Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;



6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
9. Revisi Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
10. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

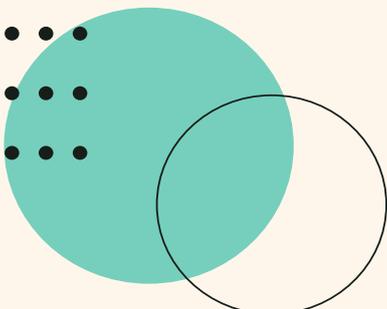


## BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### II.2. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep Balanced Score Card (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

*Table 2. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas III Sulawesi Barat*

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET S.D 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	80
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0



		Transportasi	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Trasnportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	55



			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	7
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNECE)*	Unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran	Lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

#### II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat merupakan kontrak kerja Tahunan antara Balai Pengelola Transportasi Darat



Kelas III Sulawesi Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp.33.093.953,- adalah sebagai berikut:

Table 2. 2 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET S.D 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	80
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100



3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Trasnportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	55
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

#### II.2.1. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu berjalan dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan



dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Table 2. 3 Uraian Perjanja Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	80
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2.	SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	100
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	55
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4.	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80



	Dukungan Teknis Transportasi Darat				
5.	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Table 2. 4 Nomenklatur Program

NOMENKLATUR PROGRAM		PAGU
022.03	Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sul-Bar	33.093.953.000
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	27.288.543.000
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2.563.640.000
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	19.361.285.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1.645.112.000
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	5.805.410.000
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.805.410.000

#### II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP, IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 33.093.953.000,-

Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Juni 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:



Table 2. 5 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	80
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	55
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	24
			IKK3.5	Jumlah	Orang	600



				masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan		
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Table 2. 6 Nomenklatur Program

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	19.361.285.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

#### II.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adanya pergantian atau mutasi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.



Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 33.093.953.000,-

Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Juni 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Table 2. 7 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang	%	100



				terhadap kondisi ideal		
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	24
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Table 2. 8 Nomenklatur Program

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	19.361.285.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

### II.2.3. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :



1. Adanya pergantian atau mutasi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Adanya penambahan Pagu Anggaran untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 37.933.113.000,-

Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Desember 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Table 2. 9 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan	%	60

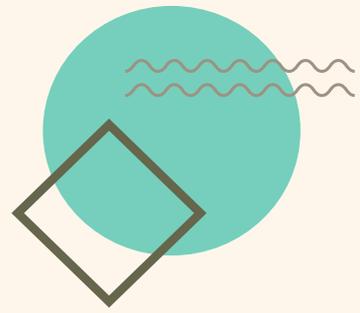


				Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP		
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80



Table 2. 10 Nomenklatur Program

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
6.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
7.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
8.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	24.200.445.000,-
9.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

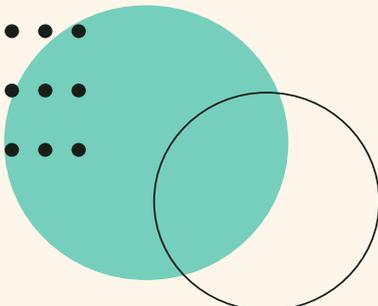


## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

#### III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II, III dan IV mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

##### III.2.1. Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### III.2.3. Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator

kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 6 (Enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

#### III.2.4. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2024		
				T	R	C
(1)		(2)	(3)	(13)	(14)	(15)
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi</b>					
IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100%	100%
IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	0%
IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%
IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	0%
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	0	0	0	0%
IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100%
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat</b>					
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	60	60	64,5%	107,5%



IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-	-	-	-
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25%	100%
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat</b>					
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	100	100%
IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	18,78	93,9%
IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0	0%
IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0%
IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	600	600	600	100%
IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	0	0	0	0%
IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	0	0	0	0%
IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	0%
<b>SK5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat</b>					
IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi	Nilai	80	80	79	98,75%



	Darat					
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					
IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	78	97,5%
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</b>						99,76%
<b>Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)</b>						7
<b>Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK&lt;100%)</b>						3
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan</b>						100%

### III.2.5. SK1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan. Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan  
Antarmoda

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

#### III.2.5.1. IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelayanan angkutan keperintisan di wilayah daerah terisolir dan perbatasan sangat diperlukan untuk membuka dan menghubungkan aksesibilitas serta menunjang

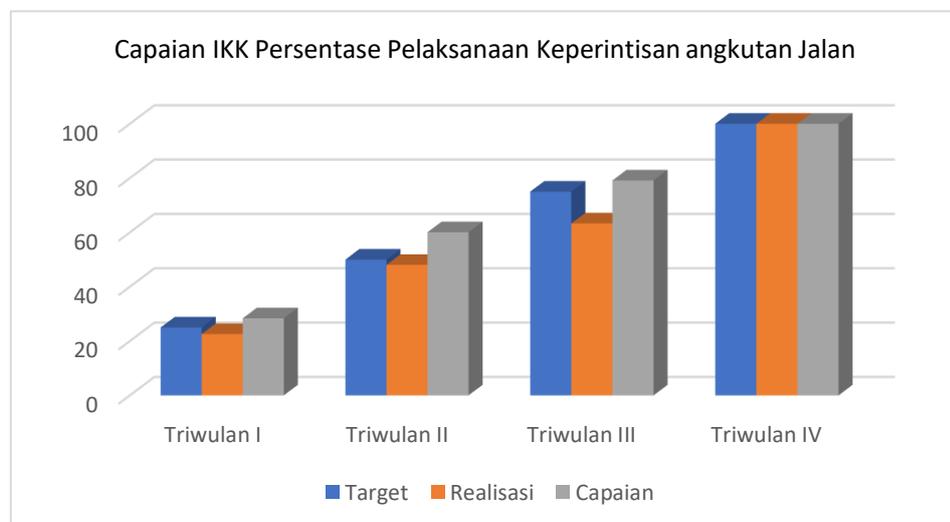
kegiatan sehari-hari yang cukup tinggi. Terdapat beberapa tuntutan pemakai kendaraan angkutan keperintisan jalan antara lain peningkatan kapasitas penumpang yang menghendaki tingkat pelayanan memadai meliputi : waktu tempuh, waktu tunggu, dan keamanan yang terjamin selama dalam perjalanan.

Transportasi darat merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh pada keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Semua sendi pembangunan akan sangat tergantung pada kinerja sektor transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kota-kota besar secara langsung meningkatkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kebutuhan akan mobilitas dan pergerakan baik orang maupun barang dan secara langsung pula berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Pemulihan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, diikuti dengan semakin pentingnya sektor transportasi terutama sektor transportasi darat. Mobilitas manusia dan barang yang semakin tinggi berimplikasi pada semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tertahap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan untuk Tahun 2024 pada BPTD Kelas III Sulawesi Barat dapat direalisasikan di tahun 2024. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan berikut:



Gambar 3. 1 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Angkutan Jalan



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis, BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat menyelenggarakan subsidi angkutan jalan perintis berupa bus operasional perintis. Dengan demikian, keberhasilan atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

• Dasar Hukum

Penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Dengan adanya penetapan ini dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

- 1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 3) PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

• Target, Revisi Target Pada Perjanjian Kinerja

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2024, IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target kinerja sebesar 80%. Pada tahun berjalan terdapat perubahan target kinerja menjadi sebesar 100%.

• Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- 2) Melakukan penambahan ritase di hari lain, apabila dalam 1 (satu) hari belum terpenuhitarget ritase.
- 3) Melakukan penertiban angkutan plat hitam bersama dengan Dinas Perhubungan setempat.



- Faktor kegagalan dan potensi kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Makin menurunnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
- 2) Masih terdapat jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Terdapat angkutan plat hitam yang perlu ditertibkan bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, yaitu:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Table 3. 2 Trayek Ritase Angkutan Keperintisan Jalan

No	Trayek yang telah ditetapkan	Trayek yang dilayani
1	Terminal Tupalayo – Bambaira	Terminal Tupalayo – Bambaira
2	Terminal Majene - Aralle	Terminal Majene - Aralle
3	Terminal Majene – Pamboang – Baruga	Terminal Majene – Pamboang – Baruga
4	Mamuju – Tasiu – Salubatu – Keppe	Mamuju – Tasiu – Salubatu – Keppe
5	Mamuju – Martajaya	Mamuju – Martajaya
6	Batu Parigi – Mamuju - Lambanan	Batu Parigi – Mamuju - Lambanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan, jumlah trayek yang terlayani adalah sebanyak 6 (enam) trayek, sesuai didalam Surat Keputusan terdapat 6 (enam) trayek. Untuk pelaksanaan kontrak pada 6 (enam) trayek dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, memiliki target rit sebanyak 1902 rit, sampai dengan akhir tahun realisasi rit adalah sebanyak 1917 rit, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{1902}{1917} \times 100\% = 100\%$$



Jadi, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan adalah 100%.

- Perhitungan capaian kinerja

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan akhir tahun 2024 masih belum tercapai. Dan direncanakan akan tercapai pada akhir tahun anggaran 2024.

- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 terdapat Kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu :Rp. 3,718,506,000.00,-

Realisasi :Rp. 3,701,346,224.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

- 1) Mengusulkan jaringan trayek perintis baru kepada Direktorat Angkutan Jalan sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Meningkatkan pelayanan dari bus perintis pada masing-masing trayek, misalnya menggunakan bus ber AC, dengan jam operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- 3) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota terkait adanya

angkutan jalan perintis yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan bus perintis tersebut.

- 4) Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di Wilayah kerja BPTD Kelas III Sulawesi Barat.

a.5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 80%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 1.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 1.1	-	-	-	-
3	2022	IKK 1.1	-	-	-	-

4	2023	IKK 1.1	80%	80%	100%	-
5	2024	IKK 1.1	100%	100%	100%	Tetap

1) Justifikasi Narasi Realisasi Naik

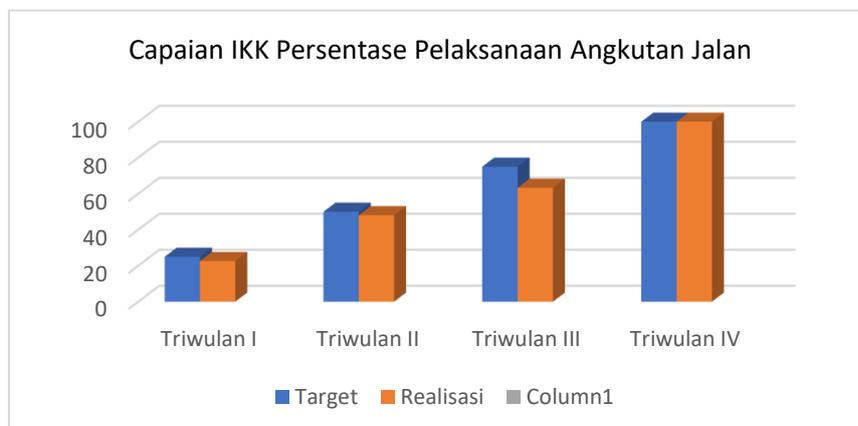
Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% naik dari tahun 2023 sebesar 80% dikarenakan terjadi kenaikan pada target pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dilaksanakan lebih baik lagi.

2) Justifikasi Narasi Capaian Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 3 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024		Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	100	22,57	28,37
Triwulan II Tahun 2024	100	48,04	60,05
Triwulan III Tahun 2024	100	63,3	79,13
Triwulan IV Tahun 2024	100	100	100

Capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 100%.

#### a.7. Benchmark nasional/internasional

Untuk benchmark Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 4 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,80%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

### III.2.5.2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

#### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat memiliki 2 (dua) Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A sebagai berikut :

- 1) Terminal Tipe-A Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Merupakan Terminal dimana lebih kepada sistem pelayanan kendaraan yang bersifat lintasan, yang terletak di Kota Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan luas lahan 3,4 ha dan luas Bangunan Terminal sebesar 2.290 m<sup>2</sup>. Melayani Lintasan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Terminal Tipe-A Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

Fasilitas Utama	Fasilitas Pendukung
Jalur Keberangkatan	Fasilitas Keamanan
Jalur Kedatangan	Ruang Istirahat Pengemudi
Ruang Tunggu	Endapan Bus
Area Parkir	Masjid

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- Aspek Pelayanan Publik  
Petugas memberikan informasi arah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.
- Aspek Keamanan  
Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan lintasan.
- Aspek Kenyamanan  
Faktor usia bangunan yang sudah tua dan kebutuhan akan renovasi dan perbaikan gedung utama maupun fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti, ruang tunggu, tempat ibadah, ruang istirahat sopir, ruang ibu menyusui (Laktasi), klinik dan fasilitas lainnya menimbulkan ketidaknyamanan dan kurangnya animo pengunjung pada terminal Tipe- A Tupalayo.

- **Aspek Sosial**  
Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar agar terjalin hubungan yang harmonis.
- **Aspek Fasilitas Sarana dan Prasarana**  
Fasilitas utama dan penunjang yang tersedia di Terminal Tipe-A Tupalayo, sangat kurang memadai dan tidak memenuhi standar oleh karena kondisi dan usia.
- **Aspek Inovasi dalam Bekerja**  
Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memberkan informasi pengumuman, pembagian masker secara gratis, dan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan terminal di media sosial.  
Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meramaikan terminal tipe A dalam Tahun 2024 sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>UPAYA YANG DILAKUKAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Sosialisasi kepada PO melayani dalam trayek yang berada di luar Terminal	Agar PO berkantor dan menjual tiket di dalam Terminal	PO sudah berpindah, namun ada beberapa yang belum di sebabkankarena kontrak sewa bangunan yang belum habis.
2	Edukasi dan himbauan kepada penumpang dan masyarakat tentang aturan Terminal	Menjadikan fungsi terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang	Masyarakat mulai sadar mematuhi dan memahami aturan
3	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Memperkuat dalam melaksanakan tugas untuk penertiban angkutan umum	Dalam pelaksanaan Gakkum instansi lain berpartisipasi, oleh pihak (POLRI, TNI, Dishub)
4	Penegakkan Hukum dan penindakan terhadap Angkutan Umum yang melanggar Aturan	Menertibkan Angkutan Umum agar tertib dan masuk ke terminal	Masih banyak angkutan umum yang melakukan pelanggaran (tidak masuk ke terminal dan masih menurunkan penumpang diloket luar terminal)



5	Memberlakukan aturan terhadap pengguna terminal seperti: Agen memakai saragam dan ID card, menjaga kebersihan	Ketertiban dan kerapian terminal agar indah dan rapi pada semua aspek lingkungan dan penggunaannya	Pengguna terminal sudah mematuhi aturan berseragam, dan menjaga kebersihan di tempatnya.
6	Membentuk komunitas di lingkungan Terminal	Terjalannya kerja sama yang bagus antar warga terminal dan menjaga kerharmonisan dalam bekerja.	Adanya komunitas PKBT dan PKBT ibu-ibu PKK oleh anggota terminal dengan warga pengguna terminal.
7	Mengadakan kegiatan pertandingan olahraga dan keagamaan	Menarik perhatian warga sekitar terminal untuk berpartisipasi dalam kegiatan di terminal	Dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bola Voly, Takraw, Jum'at Berbagi, dan acara tausiyah bulanan.
8	Promosi dan ekspos lingkup terminal lewat media social dan media cetak	Agar masyarakat mengetahui lingkup dan memfungsikan terminal	Postingan kegiatan terminal lewat facebook, Instagram dan TV Nasional.
9	Kegiatan memperindah dan menjaga kebersihan Terminal	Menambah keindahan dan warna Terminal,	Program penanaman bunga di terminal.
10	Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna terminal (agen PO, pramudi bus, penumpang dan calon penumpang, pedagang, pengunjung /pengantar / penjemput.)	Agar pengguna terminal memiliki rasa aman, nyaman berada di terminal	Beberapa upaya yang telah dilakukan dan direncanakan untuk meramaikan terminal akan pengunjung dan kegiatan operasional di terminal.

Capaian kerja terhadap aspek sebagai indikator di Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar sudah mencapai 100% (maksimal) di tiap triwulannya.

- 2) Terminal Tipe-A Simbuang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Merupakan Terminal Tipe-A dengan pelayanan AKAP dan AKDP dengan luas 33.420 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 828 m<sup>2</sup> terletak di pusat kota Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan fasilitas sarana dan prasarana yang telah memadai.



Terminal Tipe-A Simbuang memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

Fasilitas Utama	Fasilitas Pendukung
Jalur Keberangkatan	Endapan Bus
Jalur Kedatangan	Ruang Istirahat Pengemudi
Ruang Tunggu	Kios/Kantin
Area Parkir	Musholla
Perlengkapan Jalan / Rambu	Toilet
Loket Penjualan Tiket	
Pusat Informasi	
Gedung Utama/Kantor	
Peron	

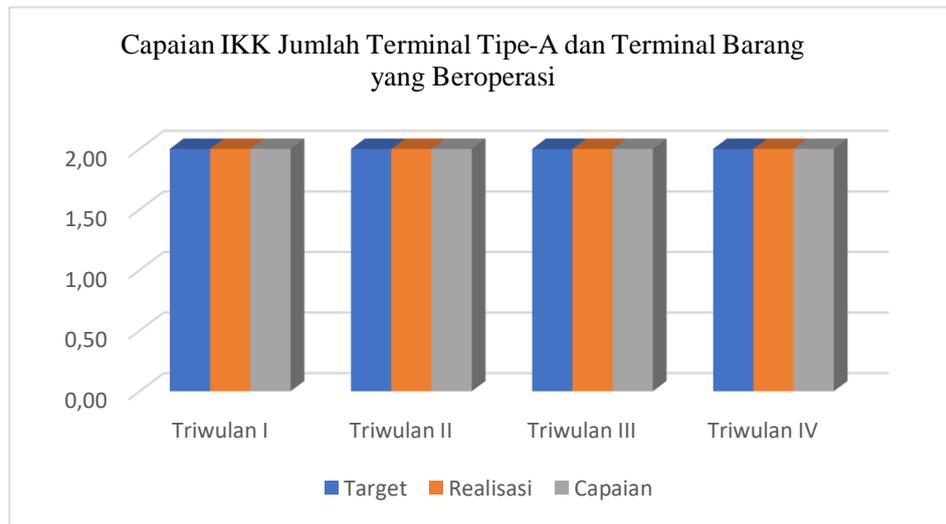
Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Simbuang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- Aspek pelayanan publik;
- Aspek keamanan;
- Aspek kenyamanan;
- Aspek sosial;
- Aspek fasilitas sarana dan prasarana; dan
- Aspek inovasi dalam bekerja.

Capaian kerja terhadap aspek sebagai indikator di Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Simbuang sudah mencapai 100% (maksimal) di tiap triwulannya. BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki Satuan Pelayanan Terminal Barang.

#### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tertahap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A untuk Tahun 2024 sebanyak 2 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A.



Gambar 3. 4 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat memiliki 2 (dua) Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe- A, Terminal Tipe-A Tupalayo dan Terminal Tipe-A Simbuang sesuai dengan target target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Terminal yang Dikelola}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu Operasional Terminal Tipe-A yang dikelola memiliki target keuangan Tahun 2024 senilai Rp. 2,212,743,000.00,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp. 2,197,735,665.00,- atau mencapai 100%.

#### • Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- 4) PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan



Jalan.

- Kronologi Target, Revisi Target Pada Perjanjian Kinerja

Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target kinerja sebanyak 2 lokasi, masih belum terjadi perubahan target kinerja sampai dengan akhir tahun 2024.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Jumlah terminal yang berada di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat adalah sebanyak 2 lokasi, hal ini sama dengan jumlah Terminal yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
- 2) Melakukan upaya-upaya dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemanfaatan guna upaya peramaian terminal.
- 3) Melakukan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana terminal, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Terminal.

- Faktor Kegagalan Atau Potensi Kegagalan

- Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat terminal-terminal bayangan yang beroperasi;
- 2) Mulai berkurangnya jumlah pengguna terminal, karena di beberapa lokasi, banyak penumpang yang menunggu bus di luar wilayah terminal.
- 3) Terdapat beberapa perusahaan bus angkutan yang melayani pembelian tiket melalui agen bus diluar area terminal.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, yaitu:

*IKK 1.3= Jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang yang Beroperasi*

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat berjumlah 2 (dua) lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

Table 3. 5 Terminal Tipe-A yang Beroperasi

No	Nama Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A	Kab. / Kota	Status P3D	Beroperasi/ Tidak beroperasi
1	Simbuang	Kabupaten Mamuju	Diserahkan	Beroperasi
2	Tipalayo	Kabupaten polewali mandar	Diserahkan	Beroperasi

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah sebanyak 2 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = 2 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah 2 lokasi. Tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah terminal yang beroperasi.

- Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, target kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan akhir tahun 2024 telah tercapai.

- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 terdapat Kegiatan Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, dengan detail anggaran sebagai

berikut :

Pagu : Rp. 2,212,743,000.00,-

Realisasi : Rp. 2,197,735,665.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan optimalisasi outcome dari pembangunan Terminal Tipe A Simbuang dan Terminal A Tupalayo;
- Melakukan pemanfaatan terminal tipe A Simbuang dan Terminal A Tupalayo sesuai peraturan yang berlaku sehingga mendatangkan hasil PNBPN;
- Melakukan sosialisasi yang lebih intens terkait dengan upaya peramaian terminal;
- Perbaiki sistem informasi atau digitalisasi informasi yang dapat mendukung kualitas pelayanan pada terminal dan E-Ticketing.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 2 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat



mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 2 Lokasi, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

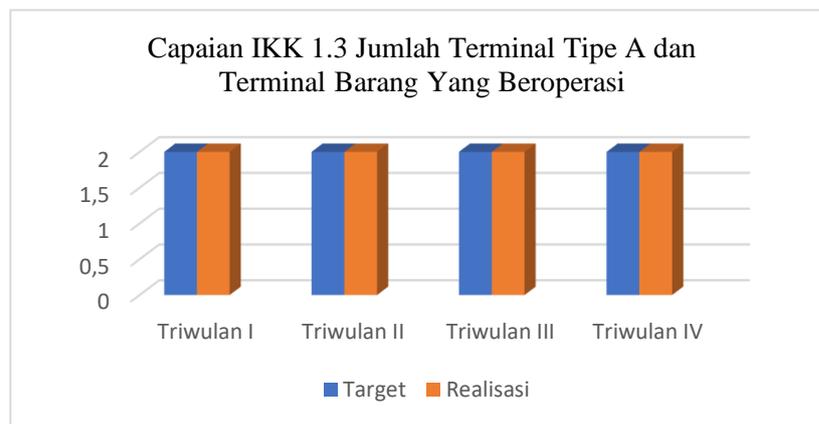
SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 1.3	-	-	-	-
2	2021	IKK 1.3	-	-	-	-
3	2022	IKK 1.3	-	-	-	-
4	2023	IKK 1.3	2	2	100%	-
5	2024	IKK 1.3	2	2	100%	Tetap

1) Justifikasi Narasi Capaian Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 2 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



*Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.*

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

*Table 3. 6 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024*

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	2	2
Triwulan II Tahun 2024	2	2
Triwulan III Tahun 2024	2	2
Triwulan IV Tahun 2024	2	2

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis nilainya sebesar 100%.

#### a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang

Beroperasi BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 7 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang sama dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

### III.2.5.3. IKK 1. 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

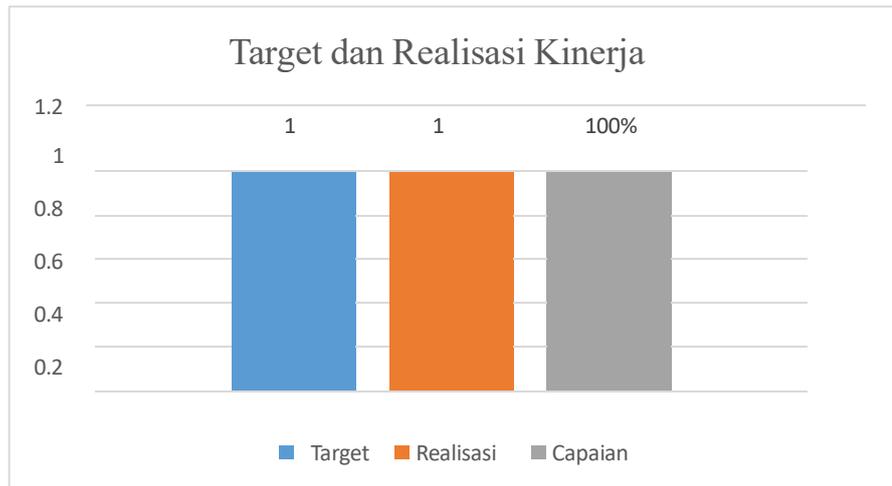
#### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi. Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}$$

#### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebagai berikut :



Gambar 3. 7 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu 100%. Sampai dengan akhir Tahun 2024 tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja adalah 100%.

#### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor PP 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, bahwa Balai Pengelola Transportasi melakukan pengawasan terhadap 1 Pelabuhan SDP yang beroperasi. Banyak faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan indikator jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi;
- 4) Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

- Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target kinerja pada awal tahun sebanyak 1 lokasi, dimana sampai dengan akhir Tahun 2024 masih belum ada perubahan pada target Perjanjian Kinerja.



- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP pada Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
- 2) Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan pelabuhan penyeberangan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.
- 3) Meningkatkan informasi terkait layanan pelabuhan.

- Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan yang memerlukan rehabilitasi dan penyesuaian dermaga untuk berlabuhnya kapal serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak disebabkan oleh bencana alam gempa bumi;
- 2) Masih banyak pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh orang pribadi;
- 3) Masih kurangnya fasilitas-fasilitas di area pelabuhan.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, yaitu:

$$\text{IKK 1.6} = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi}$$

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Pelabuhan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Sulawesi Barat berjumlah 1 (satu) lokasi sedangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2024 jumlah pelabuhan yang beroperasi ada sebanyak 1 (satu) lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

Table 3. 8 Pelabuhan Eksisting

No	Nama Pelabuhan	Lokasi		Penyelenggara	Lintas Yang Dilayani	Ket
		Kab. / Kota	Pulau			
1	Mamuju	Mamuju	Sulawesi	PT. ASDP	Mamuju - Kariangau	Satpel

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi adalah sebanyak 1 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah 1 lokasi.

- Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 100%

Jadi, target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan akhir tahun 2024 sudah tercapai.

- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat Kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 350,897,000.00,-

Realisasi : Rp. 347,109,425.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perbaikan implementasi dilapangan yaitu Koordinasi dengan para operator pelabuhan agar dapat dilakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas di pelabuhan penyeberangan sehingga dalam operasional pelabuhan penyeberangan mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan para pengguna jasa transportasi angkutan penyeberangan;
- Melakukan evaluasi mandiri terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Pelabuhan SDP yang beroperasi;
- Mendorong adanya Sistem informasi yang dapat dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2023



Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 1 Lokasi, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 1.6	-	-	-	-
2	2021	IKK 1.6	-	-	-	-
3	2022	IKK 1.6	-	-	-	-
4	2023	IKK 1.6	1	1	100%	-
5	2024	IKK 1.6	1	1	100%	Tetap

1) Justifikasi Narasi Capaian Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tidak adanya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi tahun 2024 sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 9 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024		Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	1	1	100%
Triwulan II Tahun 2024	1	1	100%
Triwulan III Tahun 2024	1	1	100%
Triwulan IV Tahun 2024	1	1	100%

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 100%.

#### a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 10 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,30%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

### III.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, bergantung pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Table 3. 11 SPM TTA dan Pelabuhan SDP

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2024			
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Transportasi darat</b>					
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	60	60	64,5	107,5
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25	100

#### III.2.6.2. IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

- Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/ keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$KK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A tahun 2024 sebanyak 60,5%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 60% maka capaian kinerja mencapai 107,5%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A sebagai berikut :



Gambar 3. 10 Target dan Realisasi Kinerja SPM TTA

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu 107,5%. Sampai dengan akhir Tahun 2024 tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja adalah 107,5%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- 4) PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

- Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dengan target sebesar 60% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan perjanjian kinerja.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
- 2) Sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.

- Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya biaya pemeliharaan bangunan dan gedung terminal;
- 2) Banyak fasilitas utama dan penunjang yang tidak tersedia atau tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak;
- 3) Masih sedikitnya jumlah SDM untuk melakukan kebersihan di lingkungan terminal.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, dapat dihitung sebagai berikut:



$$IKK2.1 = \frac{79 + 50}{2} \times 100\% = 64,5\%$$

Jadi, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A adalah 64,5%.

- Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK2.1} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{64,5}{60} \times 100\% = 107,5\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2024 terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 107,5%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sampai dengan akhir Tahun 2024 tidak tercapai.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A, Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan dan Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional). Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 150.000.000,00,-

Realisasi : Rp. 130.327.000,-

% Capaian Keuangan : 99,87%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian

dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A;

- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 64,5% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 107,5% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 0%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 107,5%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 2.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 2.1	-	-	-	-
3	2022	IKK 2.1	-	-	-	-



4	2023	IKK 2.1	0%	0%	100%	-
5	2024	IKK 2.1	60%	64,5%	107,5%	Naik

1) Justifikasi Narasi Realisasi Naik

Pada tahun 2024 realisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A sebesar 64,5% naik dari tahun 2023 sebesar 64,5% dikarenakan terjadi kenaikan pada target pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A dilaksanakan lebih baik lagi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 64,5% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 107,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 12 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024		Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	13,74	100	25%
Triwulan II Tahun 2024	27,48	40,8	40,80%



Triwulan III Tahun 2024	41,23	60,5	100%
Triwulan IV Tahun 2024	60	64,5	107,5%

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 107,5% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 107,5%.

a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A Tahun 2024 adalah 107,5%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 13 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	107,5%	97,33%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

### III.2.6.2. IKK 2.2 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

#### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahueni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelabuhan Penyeberangan sebagai tempat pelayanan jasa angkutan penyeberangan, wajib juga memenuhi SPM yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Adapun BPTD Kelas III Sulawesi Barat sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP juga bersinergi dengan para operator Pelabuhan SDP yang ada di wilayah Sulawesi Barat untuk memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM pada pelabuhan-pelabuhan SDP yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Berikut perhitungannya IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP:

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 60,25% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP sebagai berikut :



Gambar 3. 13 Target dan Realisasi Kinerja SPM Pelabuhan SDP

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu 100%. Sampai dengan akhir tahun tidak terdapat perubahan target perjanjian kinerja.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

- 1) PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 2) PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Penyeberangan;
- 3) PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.

• Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dengan target sebesar 60% yang

merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- 2) Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

- Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- 2) Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- 3) Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, yaitu:

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memnuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

$$= \frac{60,25}{1} \times 100\% = 60,25\%$$

Jadi, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP adalah 60,25%.

- Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{60,25}{60} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 100%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan akhir Tahun 2024 tercapai.

- Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola, engan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp 150.000.000,00,-

Realisasi : Rp 130.327.000,-

% Capaian Keuangan : 99,87%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 60,25% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 60,25%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 2.2	-	-	-	-
2	2021	IKK 2.2	-	-	-	-
3	2022	IKK 2.2	-	-	-	-
4	2023	IKK 2.2	100%	0%	100%	-
5	2024	IKK 2.2	60%	60,25%	100%	Naik

1) Justifikasi Narasi Realisasi Naik

Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 60,25% naik dari tahun 2023 sebesar 0% dikarenakan terjadi penurunan pada target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka

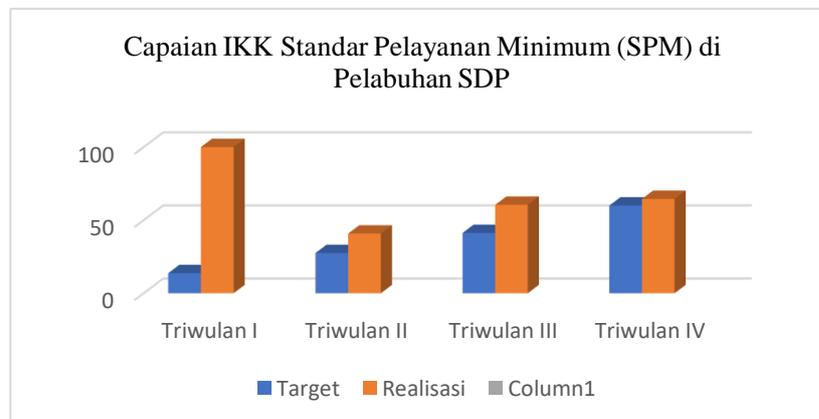
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dilaksanakan lebih baik lagi.

2) Justifikasi Narasi Capaian Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 60,25% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 14 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	13,74	100
Triwulan II Tahun 2024	27,48	40,8
Triwulan III Tahun 2024	41,23	60,25

Triwulan IV Tahun 2024	60	60,25	100%
------------------------	----	-------	------

Capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis lebih besar nilainya sebesar 100%.

a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Persentase Pelaksanaan Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 15 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	97,31%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

III.2.7. SK4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

III.2.7.1. IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada Tahun 2024 dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai angka 100% dari target 100%. Berikut grafik atas realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebagai berikut:



Gambar 3. 16 Target Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum



- 1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) PM Perhubungan No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 3) Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 – 2024;
- 4) PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

• Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada Tahun 2024 rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

• Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perencanaan yang matang;
- 2) Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- 3) Optimalnya pengawasan pembangunan.

• Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya anggaran;
- 2) Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- 3) Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

• Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = 100\%$$

Jenis Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024, sebagai berikut:

Table 3. 16 Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024



No	Jenis Perlengkapan Jalan	Volume	Satuan	Capaian s.d September
1	Pengadaan Rambu	152	Unit	152
2	Pengadaan APJ Ganda	57	Unit	57
3	Pengadaan APJ Tunggal	52	Unit	52
4	Pengadaan APILL	1	Unit	1
5	Pengadaan Warning Light	2	Unit	2
6	Pemeliharaan APJ	42	Unit	42
	Total	306		306

• Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{306}{306} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

• Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan sebagai berikut :

Pagu : Rp 21,461,743,000.00,-

Realisasi : Rp 18,041,593,200.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
- Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progres kerja berjalan;
- Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 100%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 107,5%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transporrtasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 3.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 3.1	-	-	-	-

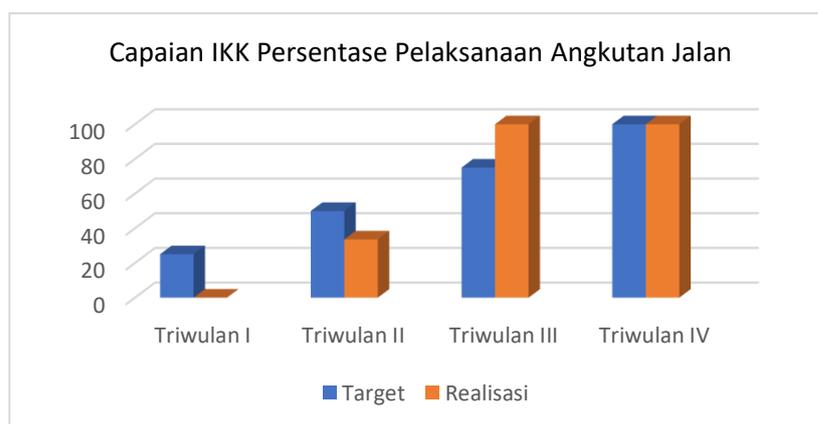
3	2022	IKK 3.1	-	-	-	-
4	2023	IKK 3.1	100%	100%	100%	-
5	2024	IKK 3.1	100%	100%	100%	Tetap

1) Justifikasi Narasi Realisasi Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian pelaksanaan Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya kenaikan maupun penurunan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 17 capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	25	0



Triwulan II Tahun 2024	50	33,57	67,14
Triwulan III Tahun 2024	75	100	100
Triwulan IV Tahun 2024	100	100	100

Capaian kinerja Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada renstra sesuai dengan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis sama besar nilainya yaitu 100%.

a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Standar Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 18 *Benchmark Nasional*

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	99,02%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian IKK Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

III.2.7.2. IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengoperasian Fasilitas Penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Fasilitas penimbangan digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

- 1) Tata cara pemuatan barang;
- 2) Dimensi kendaraan angkutan barang;
- 3) Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- 4) Dokumen angkutan barang;
- 5) Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- 6) Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Pengawasan, penindakan dan pencatatan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Penyelenggaraan UPPKB meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan dan pengadaan;
- 2) Pengoperasian;
- 3) System informasi;
- 4) Perawatan;
- 5) Pengawasan dan pengendalian; dan
- 6) Penilaian kinerja.

Pengawasan yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO. Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah kendaraan yang melanggar terhadap Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB. Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang melanggar}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan transportasi yang berkeselamatan perlu dilakukan langkah- langkah guna menurunkan tingkat pelanggaran khususnya angkutan barang. UPPKB dalam memberikan edukasi serta penegakan hukum telah memberikan efek penurunan pelanggaran dalam hal ini persentase kendaraan yang melanggar mengalami penurunan dari jumlah kendaraan yang diperiksa dengan Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 18,78% kendaraan yang tidak melanggar dari persentase kendaraan yang diperiksa jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 20% persen maka capaian kinerja mencapai 106%. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pelanggaran UPPKB

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 3) PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
- 4) Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 5) Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.



- Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 55% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja dari 55% menjadi 20% untuk relisasi kinerja.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian edukasi dan penegakan hukum terhadap kendaraan – kendaraan yang melanggar yang memberikan efek signifikan terhadap penurunan pelanggaran;
- 2) Adanya koordinasi yang baik antara pihak penegak hukum;
- 3) SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
- 4) Pelayanan serta etos kerja yang semakin baik pada UPPKB

- Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan SDM yang kurang mendukung pelaksanaan capaian indikator kegiatan;
- 2) Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai guna menunjang kegiatan;
- 3) Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- 4) Kurangnya kesadaran pengemudi terkait pentingnya melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK 3.2 &= \frac{\text{jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\% \\ &= \frac{10104}{53808} \times 100\% \\ &= 18,78\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{(20 - (18,78 - 20))}{20} \times 100\% \\ &= 106\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan sebagai berikut :

Pagu : Rp 2,388,702,000.00,-

Realisasi : Rp 2,368,118,374.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Perbaiki implementasi dengan meningkatkan koordinasi bersama para penegak hukum agar proses penindakan dapat berjalan dengan baik;
- Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
- Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring perbaikan – perbaikan fasilitas yang ada di UPPKB;
- Melakukan Sosialisasi kegiatan penegakan hukum bagi pelaku transportasi.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 18,78% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 20% maka capaian kinerja mencapai 106% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 14,24%, sehingga nilai capaian sebesar 71,2% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 106%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transporrtasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 3.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 3.1	-	-	-	-
3	2022	IKK 3.1	-	-	-	-
4	2023	IKK 3.1	55%	14,24%	71,2%	-
5	2024	IKK 3.1	20%	18,78%	106%	Naik

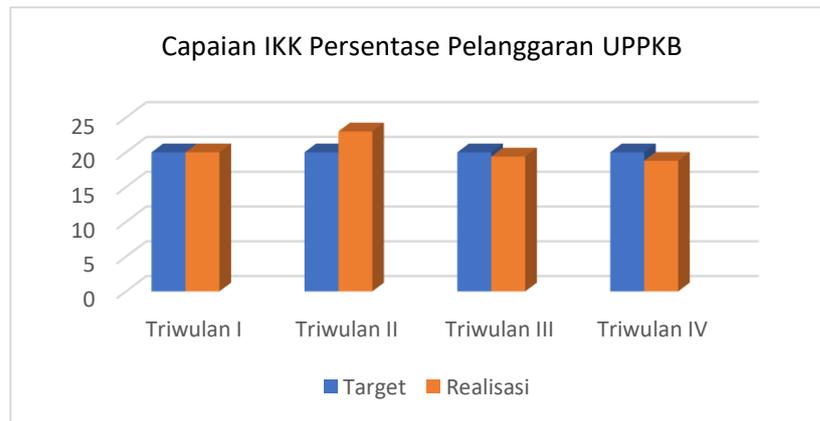
1) Justifikasi Narasi Realisasi Naik

Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 18,78% naik dari tahun 2023 sebesar 14,24% dikarenakan terjadi penurunan pada target pelaksanaan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2024 sehingga demi mencapai

target tersebut maka pelaksanaan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan lebih baik lagi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 18,78% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 20% maka capaian kinerja mencapai 106%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 19 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	20	100
Triwulan II Tahun 2024	20	115
Triwulan III Tahun 2024	20	96,95
Triwulan IV Tahun 2024	20	106

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 106% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 71,2%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Persentase Pelanggaran

pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada renstra terdapat penurunan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis sama besar nilainya yaitu 106%.

a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 adalah 106%. Berikut perbandingan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 20 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	106%	103,93%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih tinggi dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat di BPTD Kelas III Sulawesi Barat sudah baik.

III.2.7.2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

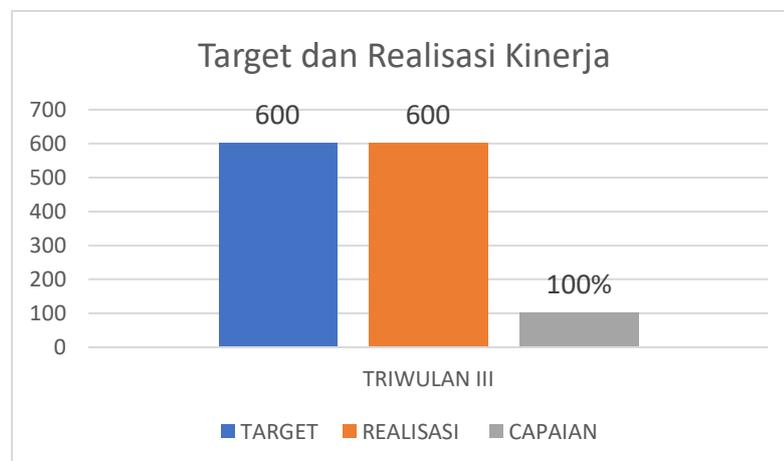
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tema yang diangkat dari tiap penyelenggaraan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan tersebut berbeda – beda. Pekan Keselamatan Jalan pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema “Street For Life #rethinkmobility”

dan pada tahun 2024 mengusung tema “Street For Life” Tema tersebut diaplikasikan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi – materi yang berkaitan dengan keselamatan di jalan dalam bentuk Penyuluhan dan edukasi keselamatan darat. Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

*IKK 3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ*

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2024 sebesar 600 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 600 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 22 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum



Sosialisasi mengenai keselamatan transportasi jalan bisa dipedomani melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 600 orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja untuk relisasi kinerja.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- 2) Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- 3) Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

- Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- 2) Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- 3) Kurangnya SDM dibidangnya.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$IKK\ 3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan}$

$$= 600 \text{ Orang}$$



- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Capaian = Realisasi Target

= 100%

- Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang melekat pada anggaran kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) yang memiliki target keuangan sebagai berikut:

Pagu : Rp 350,000,000.00,-

Realisasi : Rp 350,000,000.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan dengan matang;
- Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait demi terciptanya keberhasilan acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) tahun 2024 sebesar 600 orang jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 600 orang maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional), kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 0 orang, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 3.5	-	-	-	-
2	2021	IKK 3.5	-	-	-	-
3	2022	IKK 3.5	-	-	-	-
4	2023	IKK 3.5	0	0	100%	-
5	2024	IKK 3.5	600	600	100%	Naik

1) Justifikasi Narasi Realisasi Naik

Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) sebesar 100% naik dari tahun 2023 sebesar 100% dikarenakan terjadi peningkatan pada target pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka

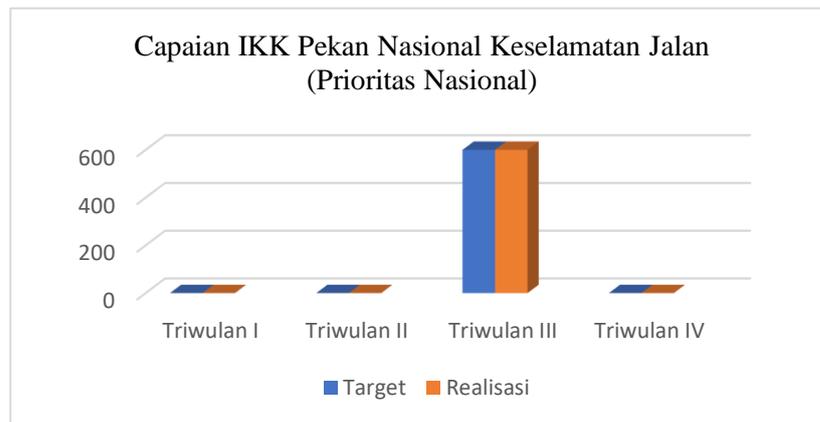
pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) dilaksanakan lebih baik lagi.

2) Justifikasi Narasi Realisasi Tetap

Pada tahun 2024 ini, dengan nilai Capaian pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya kenaikan pada target perjanjian kinerja di tahun 2024 sehingga pada nilai capaian tahun 2024 sama dengan nilai capaian tahun 2023.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) tahun 2024 sebesar 18,78% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 20% maka capaian kinerja mencapai 106%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 24 Perbandingan Realisasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 21 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	0	0
Triwulan II Tahun 2024	0	0
Triwulan III Tahun 2024	600	100%



Triwulan IV Tahun 2024	0	0	0
------------------------	---	---	---

Capaian kinerja Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) pada renstra terdapat kenaikan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis sama besar nilainya yaitu 100%.

#### a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Tahun 2024 adalah 100%. Berikut perbandingan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 22 *Benchmark* Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	100%	111,22%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) di BPTD Kelas III Sulawesi Barat perlu ditingkatkan.

### III.2.8. SK5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

#### III.2.8.1. IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM Aparatur);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pengimputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

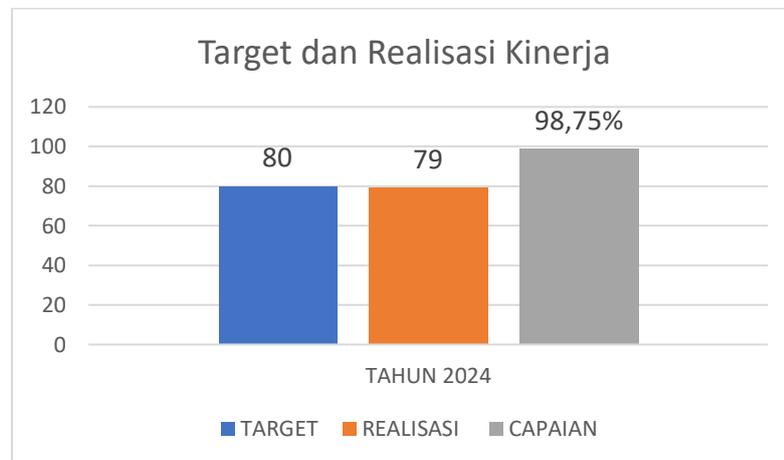
Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Table 3. 23 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

No	Uraian	Bobot	Nilai
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>25%</b>	
	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2. Perjanjian Kinerja	5%	
	3. Pengisian input e-planning	5%	
	4. Pengisian input e-performance	5%	
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>25%</b>	
	1. Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2. Kompetensi	10%	
	3. Kinerja	8%	
	4. Disiplin	1%	
<b>C</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>	<b>25%</b>	
<b>D</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b>	<b>25%</b>	
	<b>Total Nilai</b>		

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun 2024 sebesar 79% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 98,75%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 25 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- 2) PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub;
- 3) Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024.

- Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 80% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja untuk relisasi kinerja.

- Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas pelaporan dan perencanaan yang baik serta pemenuhan dokumen;



- 2) Ketepatan Penyusunan Laporan;
- 3) SDM yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

• Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya dukungan teknis dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal;
- 2) Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai dan perlunya pemenuhan;
- 3) SDM yang kurang memadai sesuai background maupun kualifikasi dibidangnya.

• Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Table 3. 24 Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>25%</b>	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input e-planning	5%	
4	pengisian input e-performance	5%	
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>25%</b>	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
<b>C</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>	<b>25%</b>	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10%	
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10%	
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5%	
<b>D</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b>	<b>25%</b>	
1	Penyusunan NSPK	7%	



	2	Pengelolaan Informasi Publik	6%	
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6%	
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6%	

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dihitung sebagai berikut:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>		<b>25%</b>	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	10
	2	Perjanjian Kinerja	5%	5
	3	pengisian input e-planning	5%	5
	4	pengisian input e-performance	5%	5
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>		<b>25%</b>	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	3
	2	Kompetensi	10%	8
	3	Kinerja	8%	8
	4	Disiplin	1%	1
<b>C</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>		<b>25%</b>	17
<b>D</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b>		<b>25%</b>	17
<b>Nilai Total</b>			<b>100%</b>	79

Jadi, pada akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah 79%

• Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{79}{80} \times 100\%$$

$$= 98,75 \%$$

- Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang melekat pada anggaran kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang memiliki target keuangan sebagai berikut:

Pagu : Rp 1,645,112,000.00,-

Realisasi : Rp 1,603,744,276.00,-

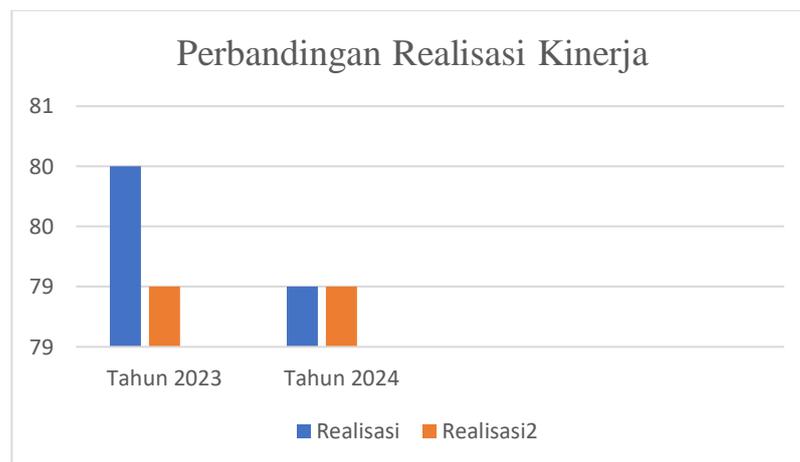
% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat–diklat yang diselenggarakan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Meningkatkan dukungan manajemen bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- Penambahan Sistem informasi sehingga kualitas Output laporan semakin baik.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 79% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 98,75% sedangkan pada tahun 2020-



2022 belum terdapat kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 80%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 98,75%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

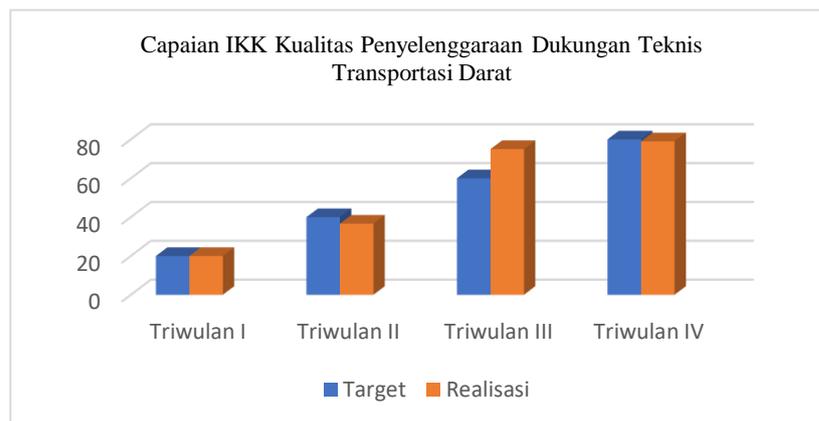
SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 5.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 5.1	-	-	-	-
3	2022	IKK 5.1	-	-	-	-
4	2023	IKK 5.1	80	80	100%	-
5	2024	IKK 5.1	80	79	98,75%	Turun

1) Justifikasi Narasi Realisasi Turun

Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 79% turun dari tahun 2023 sebesar 80% dikarenakan terjadi penurunan pada ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dilaksanakan lebih baik lagi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 79% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 98,75%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 27 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 25 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2024	20	100%
Triwulan II Tahun 2024	40	92%
Triwulan III Tahun 2024	60	125%
Triwulan IV Tahun 2024	80	98,75%

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 98,75% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada renstra tidak terdapat kenaikan maupun penurunan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis sama besar nilainya yaitu 98,75%.

#### a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 adalah 98,75%. Berikut perbandingan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi

Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 26 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	98,75%	101,39%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat di BPTD Kelas III Sulawesi Barat perlu ditingkatkan.

### III.2.8. SK6. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

#### III.2.8.1. IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

##### a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Darat tahun 2024 dihitung berdasarkan lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

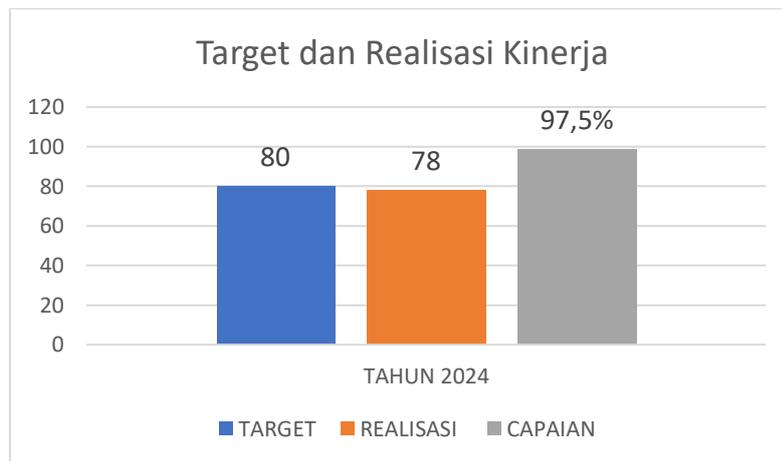
Table 3. 27 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>	
	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	<b>15</b>	
	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	<b>10</b>	
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	
<b>C</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>50%</b>	

	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

**a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Realisasi Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2024 sebesar 78% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 97,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 28 IKK Kualitas Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

**a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

• **Dasar Hukum**

- 1) Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- 2) Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024;
- 3) PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.

• **Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

Adapun target IKK Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 80% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja untuk relisasi kinerja.



• Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penilaian berkala terhadap survei kepuasan pegawai;
- 2) Tersedianya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 3) Koordinasi yang baik di lingkungan kantor.

• Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana kantor yang masih kurang memadai;
- 2) Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
- 3) Penilaian SKM yang kurang memadai.

• Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
- 2) Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- 3) Bobot:
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon IV (25%);
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
  - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Table 3. 28 Rumus Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>	
	1 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	<b>25</b>	18
B	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	20

C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	18	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	9	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	13	
	<b>Total Nilai</b>	100	78	

- Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{78}{80} \times 100\% = 97,5\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yang memiliki Target keuangan sebagai berikut:

Pagu	: Rp 5,339,910,000.00,-
Realisasi	: Rp 5,335,115,743.00,-
% Capaian Keuangan	: 100%

#### a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pembenahan dalam fasilitas penunjang kegiatan perkantoran;
- Melakukan Koordinasi yang intens terhadap pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran;
- Pembenahan Sistem informasi terkait perkantoran

#### a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023



Gambar 3. 29 Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi kinerja Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 78% jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 97,5% sedangkan pada tahun 2020-2022 belum terdapat kegiatan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat, kegiatan tersebut baru dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat mulai pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 80%, sehingga nilai capaian sebesar 100% dan pada tahun 2024 memiliki nilai capaian sebesar 97,5%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. 29 Realisasi kinerja Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024

SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No.	Tahun	IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik / Turun
1	2020	IKK 6.1	-	-	-	-
2	2021	IKK 6.1	-	-	-	-
3	2022	IKK 6.1	-	-	-	-
4	2023	IKK 6.1	80	80	100%	-
5	2024	IKK 6.1	80	78	97,5%	Turun

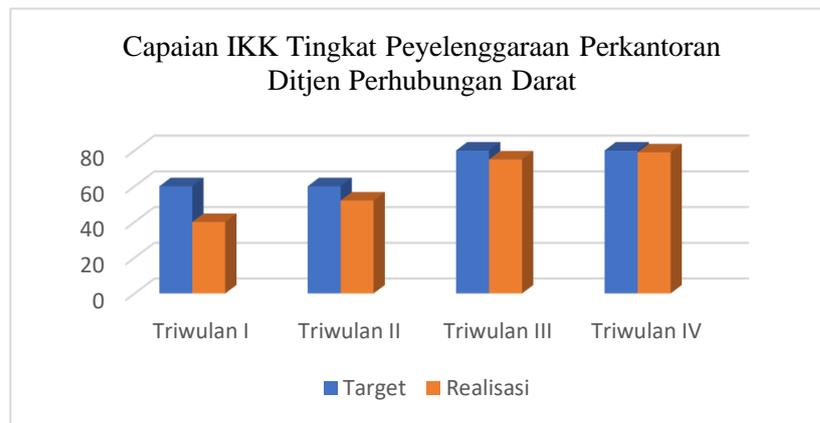
1) Justifikasi Narasi Realisasi Turun

Pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 78% turun dari tahun 2023 sebesar 80% dikarenakan terjadi penurunan pada ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan

Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2024 sehingga demi mencapai target tersebut maka pelaksanaan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan lebih baik lagi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024

Realisasi kinerja Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 78% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 97,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 dalam Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 3. 30 Capaian IKK Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Berikut ini merupakan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024.

Table 3. 30 Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024

Target Renstra 2020 2024	Realisasi	Capaian	
Triwulan I Tahun 2024	60	40	66,66%
Triwulan II Tahun 2024	60	52	86,66%
Triwulan III Tahun 2024	80	75	93,75%
Triwulan IV Tahun 2024	80	78	97,5%



Capaian kinerja Kualitas Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 dalam rencana strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat tahun 2020-2024 sebesar 97,5% jika dibandingkan dengan capaian terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, hal ini disebabkan target pelaksanaan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada renstra tidak terdapat kenaikan maupun penurunan target pada perjanjian kinerja maka capaian kinerja terhadap rencana strategis sama besar nilainya yaitu 97,5%.

a.7. *Benchmark* nasional/internasional

Untuk benchmark Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024, capaian Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 adalah 97,5%. Berikut perbandingan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan rata-rata capaian nasional dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

Table 3. 31 Benchmark Nasional

No	Uraian	BPTD Kelas III Sulbar	Rata-Rata Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja	97,5%	98,74%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian secara nasional, maka capaian Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas III Sulawesi Barat memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari rata-rata capaian secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tingkat Peyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di BPTD Kelas III Sulawesi Barat perlu ditingkatkan.

### III.3. Realisasi Anggaran

#### III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

##### III.3.1.1. Pagu Anggaran

###### a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar Rp 33.093.953.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Table 3. 32 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

<b>RM</b>	Rp.	33.093.953.000,-	100%
<b>PNBP</b>	Rp.	0,-	0%
<b>SBSN</b>	Rp.	0,-	0%
<b>Total</b>	Rp.	0,- -	100%

###### a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Table 3. 33 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.	-	0%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	17.450.251.000,-	52,72%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	15.643.702.000,-	47,28%
<b>Total</b>	Rp.	33.093.953.000,-	100%

###### a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan tahun 2024 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 0781-6107-6635-7451 pada tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 0781 6107 6635 7451 pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.



4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 24 April 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar



- Rp 33.093.953.000.
- 13.Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
- 14.Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
- 15.Revisi Ke-14 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
- 16.Revisi Ke-15 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 08 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
- 17.Revisi Ke-16 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 12 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
- 18.Revisi Ke-17 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 18 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
- 19.Revisi Ke-18 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 8811 6600 0209 1130 pada tanggal 3 Desember 2024 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
- 20.Revisi Ke-19 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 8811 6600 0209 1130 pada tanggal 15 Desember dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
- 21.Revisi Ke-20 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS :



8811 6600 0209 1130 pada tanggal 16 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.

### III.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

#### a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

Table 3. 34 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu	Sumber Dana			Jumlah (Rp.)
	RM (Rp.)	PNBP (Rp.)	SBSN (Rp.)	
Pagu Awal	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-1	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-2	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-3	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-4	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-5	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-6	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-7	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-8	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-9	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-10	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-11	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-12	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-13	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-14	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000



Revisi ke-15	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-16	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-17	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-18	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-19	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-20	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024

Table 3. 35 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah (Rp.)
	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	
Pagu Awal	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-1	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-2	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-3	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-4	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-5	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-6	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-7	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-8	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-9	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000



Revisi ke-10	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-11	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-12	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-13	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-14	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-15	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-16	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-17	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-18	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-19	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-20	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.



a.3. Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

Table 3. 36 Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan I (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan II (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan III (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan III (Rp.)
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-		
RM	-	-	-	-	-	-	-		
PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Barang	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-		22.477.261.000,-
RM	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-		22.477.261.000,-
PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-		15.455.852.000,-



Modal									
RM	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-		15.455.852.000,-
PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		



a.4. Rincian Relokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TAHUN 2024	TAHUN 2024	
				REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.093.953.000,-	33.093.953.000,-	23,008,423,432,-	90,69%
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32,127,703,000,-	32,127,703,000,-	28,609,036,664,-	89,05%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3,718,506,000,-	3,718,506,000,-	2,169,701,930,-	99,54%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2,563,640,000,-	2,563,640,000,-	2,544,234,590,-	99,24%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	24,200,445,000,-	24,200,445,000,-	20,759,711,574	85,78%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1,645,112,000,-	1,645,112,000,-	1,603,744,276,-	97,49%
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	5,791,084,863,-	99,75%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	4,404,421,320,-	99,75%

Realisasi penyerapan anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 34.400.121.527,-** atau mencapai **90.69%** dari total pagu sebesar **Rp. 37.933.113.000,-**.



### III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

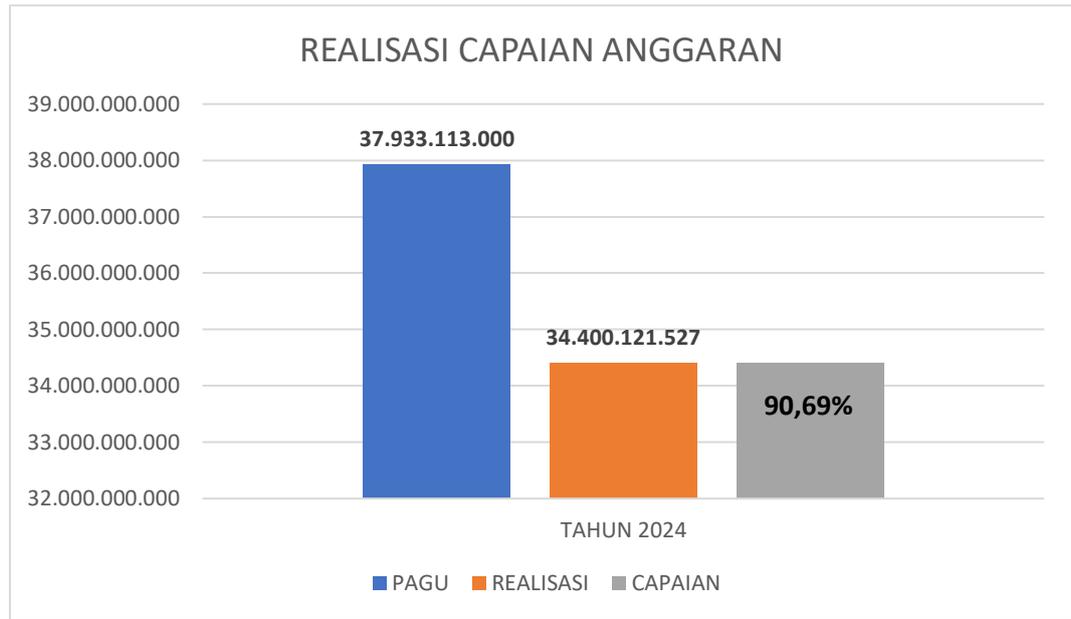
#### III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

Adapun Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Table 3. 37 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TAHUN 2024	TAHUN 2024	
				REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.093.953.000,-	33.093.953.000,-	23,008,423,432,-	90,69%
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32,127,703,000,-	32,127,703,000,-	28,609,036,664,-	89,05%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3,718,506,000,-	3,718,506,000,-	2,169,701,930,-	99,54%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2,563,640,000,-	2,563,640,000,-	2,544,234,590,-	99,24%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	24,200,445,000,-	24,200,445,000,-	20,759,711,574	85,78%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1,645,112,000,-	1,645,112,000,-	1,603,744,276,-	97,49%
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	5,791,084,863,-	99,75%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	4,404,421,320,-	99,75%

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 34.400.121.527,-** atau mencapai **90.69%** dari total pagu sebesar **Rp. 37.933.113.000,-**.



Gambar 3. 31 Realisasi Capaian Anggaran

### III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. 38 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	22.477.261.000,-	22.301.232.907,-	99,22%
3	Belanja Modal	15.455.852.000,-	12.098.888.620,-	78,28%
<b>TOTAL</b>		<b>37.933.113.000,-</b>	<b>34.400.121.527,-</b>	<b>90,69%</b>

### III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 Triwulan III untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. 39 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	90.69%
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>37.933.113.000,-</b>	<b>34.400.121.527,-</b>	<b>90.69%</b>

### III.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. 40 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	17.450.251.000,-	11.656.740.932,-	5.793.510.068,-
3	Belanja Modal	15.643.702.000,-	11.945.982.500,-	3.697.719.500,-
<b>TOTAL</b>		<b>37.933.113.000,-</b>	<b>34.400.121.527,-</b>	<b>90.69%</b>

Table 3. 41 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	3.532.991.473,-
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>37.933.113.000,-</b>	<b>34.400.121.527,-</b>	<b>3.532.991.473,-</b>

Table 3. 42 Sisa Anggaran Kontraktual dan NonKontraktual

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	-	-
3	Sisa Kontraktual	20.691.089.000	14.881.842.930
	a. Belanja Barang	5.629.387.000	3.399.379.430
	b. Belanja Modal	15.061.702.000	11.482.463.500
4	Sisa Non Kontraktual	12.402.864.000	8.370.880.502
	a. Belanja Barang	11.820.864.000	7.907.361.502
	b. Belanja Modal	582.000.000	463.519.000
5	Sisa Belanja Pegawai	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>23.252.723.432,-</b>

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebesar Rp. 37.933.113.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp. 34.400.121.527,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 90,69% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar Rp 3.532.991.473,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 9,31%.



III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan III tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Table 3. 43 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

No	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	24%	12.83%	11,17%	56.99%	36.72%	20.27%	73,99%	58.35%	15.64%	100%	99.54%	0.56%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25%	20.97%	4.03%	53.66%	43.18%	10.48%	70,66%	59.52%	11.1%	100%	99.27%	0.63%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan	22,5%	20.11%	2,39%	74,83%	62.47%	12,36%	89,88%	72.89%	16,99%	100%	85.78%	14.22%



		Transportasi Darat												
4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	20%	16.66%	3.34%	51.66%	39.82%	11.84%	74,66%	48.35%	26,31%	100%	97.49%	2.51%
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan	70%	34.49%	35,51%	81,33%	62.05%	19,28%	87,83%	75.87%	11,96%	100%	98.53%	1.47%
<b>Total</b>			32,3%	21,01%	11,28%	63,69%	48,84%	14,84	79,40%	62,99%	16,96	100%	96.12%	3.88%

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka persentase capaian keuangannya sebesar 96,12% menunjukkan adanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar 3,88%.

### III.3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Table 3. 44 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

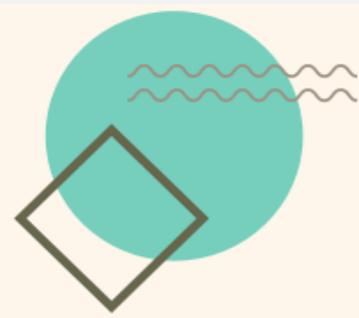
No	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	24 Orang	21 Orang	45 Orang
2	TERMINAL TIPE A SIMBUANG	14 Orang	13 Orang	27 Orang
3	TERMINAL TIPE A TIPALAYO	24 Orang	10 Orang	34 Orang
4	PELABUHAN PENYEBERANGAN MAMUJU	1 Orang	2 Orang	3 Orang
5	UPPKB BERU-BERU	10 Orang	9 Orang	19 Orang
6	UPPKB PAKU	13 Orang	17 Orang	30 Orang
7	UPPKB SARJO	1 Orang	3 Orang	8 Orang
	TOTAL	91 Orang	75 Orang	167 Orang

Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah SDM PNS di BPTD Kelas III Sulawesi Barat masih kurang, maka untuk mengakomodir beban kerja tersebut sehingga dibutuhkan bantuan tenaga PPNPN.

### IV.3. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala atas efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya, antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam Kegiatan kontrak, terdapat beberapa faktor alam yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

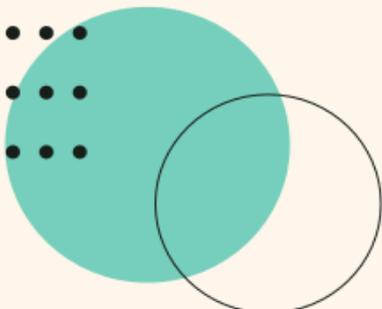


## BAB IV PENUTUP

### LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024





## BAB IV PENUTUP

### IV.1. Penutup

#### IV.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Sulawesi Barat dengan segala keterbatasan yang ada dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dari target yang telah ditentukan;
- b. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran;
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait;
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 -2024.
  - Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100% ;



- Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100% ;
- Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (1 lokasi target ) tercapai 100%;
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 64,5% (target 60%) tercapai 107%;
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 60,25% (target 60%) tercapai 100%;
- Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
- Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 24% (target 18,78%) tercapai 93,9%;
- Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 600 (target 600) tercapai 100%;
- Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 79 (target 80) tercapai 98,75%;
- Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen PerhubunganDarat terealisasi sebesar 78 (target 80) tercapai 97,5%;



IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	TAHUN 2024			EVALUASI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat & Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angutan Jalan	%	100	100	100	100	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



			IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKK 2.1	Perserentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60	60	64,5	107	Tercapai	Melakukan Monitoring terhadap SPM Terminal	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



		Darat	IKK 2.3	Persertase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25	100	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;</li><li>2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;</li><li>3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ol>	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
--	--	-------	---------	---	---	----	----	-------	-----	----------	---	--------------------------------------



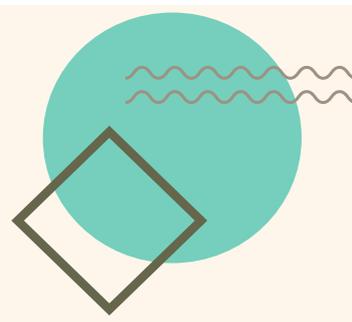
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20	20	18,78	93,9	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	600	600	600	100	Belum Tercapai	Sudah dilaksanakan dengan baik.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



4	SK 5	Meningkatnya kualitas penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Tansportasi Darat	Nilai	80	80	79	98,75	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;</li> <li>2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA;</li> <li>3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD;</li> <li>4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD;</li> <li>5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;</li> </ol>	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Nilai	80	80	78	97,5	Tercapai	Managemen terhadap Gaji dan Tunjangan SDM pegawai BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

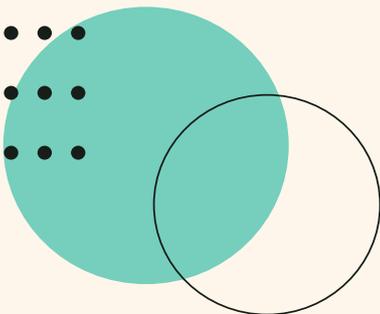


# LAMPIRAN

LAPORAN KNERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024



# Lampiran 1

## Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



**Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024**

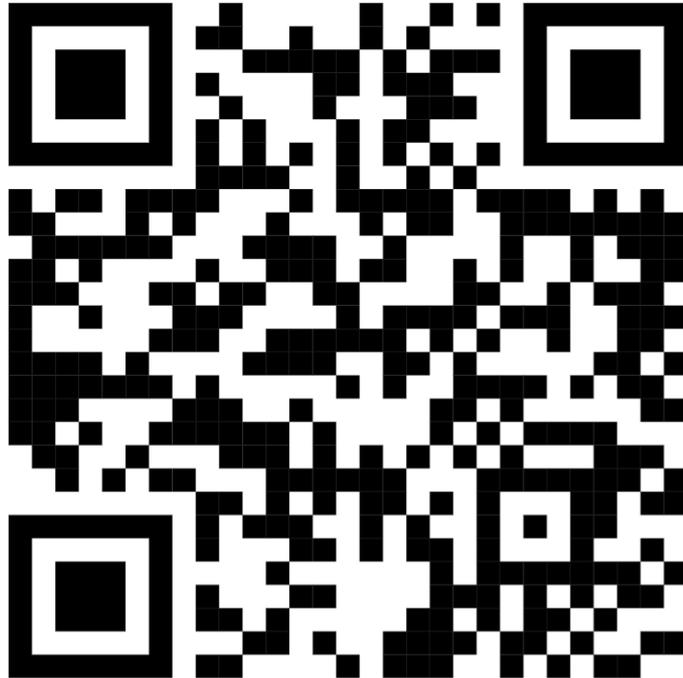
<https://me-qr.com/QRHAHGIX>

# Lampiran 2

## Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

<https://me-qr.com/EJkqZPuL>

# Lampiran 3

## Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2024



**Lampiran 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

<https://me-qr.com/56Tca8fA>

# Lampiran 4

## Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 4 Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024



Lampiran 4 Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/rlivS5vr>

# Lampiran 5

## Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 5 Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2025



Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/084h1cm0>

# Lampiran 6

## Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 6 Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2025



Lampiran 6 Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/tDqawaWb>

# Lampiran 7

## Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 7 Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024



Lampiran 7 Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/99kvQ3sG>

# Lampiran 8

## Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 8 Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024



Lampiran 8 Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/QvKuBP8R>

# Lampiran 9

## Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 9 Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024



Lampiran 9 Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/j0kY5QXh>

# Lampiran 10

## Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini

Lampiran 1. 10 Monitoring Rencan Aksi Tahun 2024



Lampiran 10 monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/JupBGPLd>